STATUS *STATELESS* KELUARGA TENTARA ISIS BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*

S K R I P S I

O l e h :

ERICK FALENO
NIM. A1012171239

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2022

STATUS *STATELESS* KELUARGA TENTARA ISIS BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*

S K R I P S I

O l e h :

ERICK FALENO
NIM. A1012171239

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022

STATUS *STATELESS* KELUARGA TENTARA ISIS BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

ERICK FALENO
NIM. A1012171239

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1 :	**Pembimbing II :**
Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum	**Erwin, S.H.,LLM**
NIP. 197901292003121001	**NIP. 198001082006041002**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.
NIP.196305131988101001

Tanggal Lulus : 14 Juni 2022

KEMENTERIAN PENDIDIKANTINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	**Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. NIP. 197901292003121001**	**Pembina Tingkat I/ IV b**	
Sekretaris	**Erwin, S.H., LL.M. NIP. 198001082006041002**	**Penata / III c**	
Penguji I	**Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. NIP. 197402072005012002**	**Penata / III c**	
Penguji II	**Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. NIP. 197308252002122001**	**Penata / III c**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4416 /UN22.1/TD.06/2022
Tanggal : 06 Juni 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"STATUS *STATELESS* KELUARGA TENTARA ISIS BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan mennyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Erwin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.LL.M, selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
8. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
9. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2017 PPAPK, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juli 2022

Penulis

Erick Faleno
NIM. A1012171239

ABSTRAK

kejatuhan ISIS setelah hancurnya benteng terakhir mereka di Suriah pada bulan maret 2019 yang lalu menyisakan banyak beban dan polemik. Salah satunya adalah pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini yang dialami oleh keluarga tentara ISIS, banyak Negara asal dari keluarga tentara ISIS ini yang menolak kepulangan kembali mereka ke Negara asalnya. yang dimana walaupun tidak memiliki peran di organisasi terorisme tersebut, kewarganegaraan mereka tetap tidak dianggap sehingga status mereka menjadi *stateless.*

Penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk memahami serta mencari solusi yang tepat berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya peran nyata yang dilakukan oleh PBB sebagai perhimpunan besar seluruh negara serta tidak adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh para keluarga tentara ISIS ini. Hal ini sangat disayangkan karena negara sebagai lembaga tertinggi yang dipercaya untuk melindungi hak-hak warga negaranya terlihat lepas tangan atas hal ini. Status *stateless* ini jelas merugikan dan membuat masa depan keluarga tentara ISIS ini menjadi tidak jelas. Negara-negara anggota PBB dapat melakukan proses peradilan yang adil sesuai dengan yang diatur di negara mereka masing-masing ataupun dengan menggunakan pengadilan HAM internasional atau bahkan menggunakan gabungan keduanya berupa *hybrid court.*

Kata kunci : *stateless* keluarga tentara ISIS, peran *Universal Declaration of Human Rights*, Asas Kewarganegaraan dan Pertanggungjawaban

ABSTRACT

The fall of ISIS after the destruction of their last stronghold in Syria in March 2019 left a lot of burdens and polemics. One of them is the revocation of citizenship status. This is experienced by the families of ISIS soldiers, many countries of origin from these ISIS soldiers' families refuse to return them to their home countries. which even though they do not have a role in the terrorist organization, their citizenship is still not considered so that their status becomes stateless.

The author uses normative research methods to understand and find the right solution based on the Universal Declaration of Human Rights. The results of this study indicate that there is no real role played by the United Nations as a large association of all countries and there is no legal certainty obtained by the families of these ISIS soldiers. This is very unfortunate because the state as the highest institution that is trusted to protect the rights of its citizens seems to be hands off on this matter. This stateless status is clearly detrimental and makes the future of the ISIS soldier's family unclear. UN member states can carry out a fair judicial process in accordance with what is regulated in their respective countries or by using an international human rights court or even using a combination of the two in the form of a hybrid court.

Keywords: stateless ISIS soldier family, role of Universal Declaration of Human Rights, Principles of Citizenship and Accountability.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kerangka Pemikiran 6

1. Tinjauan Pustaka 6

2. Kerangka Konsep 15

F. Metode Penelitian 16

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN SERTA KEBIJAKAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB**

A. Unsur Hak Asasi Manusia Di Dalam Hak Kewarganegaraan 18

B. Kebijakan Negara-Negara Anggota Pbb Terkait Kewarganegaraan Yang Terlibat Di Dalam Kelompok Terorisme Isis 26

C. Tinjauan Terkait Status Stateless Person Serta Universal

Declaration Of Human Rights 29

BAB III **ANALISIS PERAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DIDALAM PERLINDUNGAN HAM KELUARGA TENTARA ISIS**

A. Pro Dan Kontra Status Keluarga Isis 34

B. Status Stateless Keluarga Isis Ditinjau Dari Universal Declaration Of Human Rights 40

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekalahan ISIS setelah hancurnya benteng terakhir mereka di Suriah pada bulan maret 2019 yang lalu menyisakan beban yang harus ditanggung oleh suku Kurdi yang mana mereka harus menampung pengungsi suriah dan menahan para mantan-mantan tentara ISIS ini dimana beberapa diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sebanyak lebih dari dari 94% dari total hampir 70 ribu orang yang ditahan di kamp pengungsi di al-Hol adalah perempuan dan anak-anak dimana 11 ribu diantaranya adalah warga asing[1].

Keberadaan mereka disana terasa sangat membebani bagi keuangan suku Kurdi dan menyebabkan kekhawatiran bagi PBB dan dunia internasional jika mantan-mantan tentara ISIS ini di lepaskan begitu saja tanpa adanya hukuman yang dijatuhkan[2]. Hal ini dikarenakan krisis keuangan yang dialami oleh suku Kurdi karena harus menanggung pengungsi ditambah mantan-mantan tentara ISIS yang tersisa dan ditahan oleh mereka. Apalagi banyak Negara asal dari pengungsi dan mantan tentara ISIS ini yang menolak kepulangan kembali mereka ke Negara asalnya.

[1] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-250026601 diakses pada tanggal 19 desember 2019 pukul 9.37 wib

[2] https://www.merdeka.com/dunia/ditolak-negara-asalnya-nasib-para-mantan-anggota-isis-di-suriah-terkatung-katung.html diakses pada tanggal 29 september 2021 pukul 23.31 WIB

Menurut perwakilan khusus PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata[3], kesehatan mental, keselamatan, dan perkembangan anak-anak yang ditahan dalam waktu yang lama di kamp-kamp di timur laut Suriah dan Irak sedang dipertaruhkan. Dikhawatirkan mereka akan terekspos trauma dan stigmatisasi lebih lanjut, serta beresiko karena dekat dengan anggota kelompok teroris.

Ditekankan bahwa anak-anak di kamp Suriah dan Irak memiliki memiliki hak atas kewarganegaraan dan identitas dan mereka tidak boleh dibiarkan tidak memiliki kewarganegaraan. Perwakilan khusus PBB mendesak negara-negara anggota PBB untuk memulangkan anak-anak ini sehingga mereka dapat diintegrasikan kembali ke negara mereka.

Pernyataan yang dikeluar oleh UNICEF[4] mengatakan bahwa sekitar 40.000 wanita dan anak-anak yang berada di kamp pengungsian al-Hol menderita dikarenakan buruknya pelayanan kesehatan dan harus berhadapan dengan iklim panas yang ekstrim serta trauma akan kekerasan dan pemindahan paksa yang terjadi kepada mereka, ditambah lagi dengan merebaknya kasus COVID-19 yang terjadi pada kamp pengungsian tersebut.

Dikhawatirkan juga bagi anak-anak yang sebelumnya masih dibawah umur namun memasuki usia dewasa selama mereka berada di

[3]https://www.liputan6.com/global/read/4471003/pbb-desak-pemulangan-27-ribu-anak-anggota-isis-dari-suriah

[4] https://www.unicef.org/press-releases/eight-children-die-al-hol-camp-northeastern-syria-less-week

kamp pengungsian yang mana tidak cocok lagi untuk ditempatkan di kamp pengungsian khusus wanita dan anak-anak, lalu dipindahkan ke tahanan untuk orang dewasa, rawan untuk di racuni dengan ideologi-ideologi tahanan dewasa lainnya yang mana masih memihak ideologi ISIS[5]. Dan walaupun mereka diizinkan kembali ke negara asalnya masing-masing, anak-anak yang telah menjadi usia dewasa selama berada di kamp pengungsian ini akan diadili sebagai orang dewasa di negara asalnya tersebut.

Hingga kini, hanya ada beberapa negara, termasuk Rusia dan Kazakhstan yang mengadakan pertemuan virtual dengan PBB[6], telah secara kolektif memulangkan hampir 1.000 anak dan anggota keluarga mereka. Pihak berwenang Kurdi yang menjalankan daerah itu secara konsisten mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengatur persidangan untuk semua tersangka asing yang ditahan atau mendukung keluarga mereka.

jika merujuk pada Pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), keluarga yang dibawa serta oleh para militan ISIS ini tidak terkait dengan tindak kejahatannya, terkecuali jika mereka mendeklarasikan dirinya sendiri yang dengan sukarela bergabung dengan keinginan dan kesadaran sendiri. Tetapi yang terjadi di lapangan ialah sebagian besar dari mereka hanya mengikuti pasangannya untuk bergabung ke ISIS

[5] https://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/02/thousands-men-women-children-remain-detention-because-their-former-ties-isis/

[6] https://www.liputan6.com/global/read/4471003/pbb-desak-pemulangan-27-ribu-anak-anggota-isis-dari-suriah

dan tidak mempunyai kekuatan untuk menolak. Terlebih anak-anak yang masih dibawah umur, yang dimana mereka hanya mengikuti kemauan dari orangtuanya tanpa bisa menolak.

Pada beberapa kasus, sejumlah warga asing telah dipindahkan ke wilayah yurisdiksi Irak dan diadili disana. Menurut laporan yang di keluarkan oleh International *Centre for Study of Radicalisation* (ICSR) pada Juli 2019, terlihat lebih banyak Negara asal yang tampak lebih bersedia memfasilitasi kepulangan warga anak-anak, khususnya yang rapuh seperti yatim piatu. Tetapi bagaimana dengan anggota keluarga dari tentara ISIS tersebut yang dimana kewarganegaraan mereka tidak diakui oleh negara asalnya dan tidak diperkenankan untuk kembali ke negara asal mereka.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "STATUS *STATELESS* KELUARGA TENTARA ISIS BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*"

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah efek yang ditimbulkan dari status *stateless* keluarga tentara ISIS?

2. Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan oleh dunia internasional terhadap anggota keluarga dari tentara ISIS yang tidak diakui kewarganegaraanya oleh negara tempat mereka berasal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan akibat status *stateless* anggota keluarga dari tentara ISIS di mata hukum internasional terutama Universal Declaration Of Human Rights
2. Untuk mengetahui tindakan dan kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh dunia internasional kepada keluarga dari tentara ISIS yang tidak diakui kewarganegaraanya oleh negara tempat mereka berasal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penilitian ini dapat memberikan manfaat yang mana dapat membantu dalam pengembangan ilmu hukum internasional yang berkaitan dengan HAM terhadap status anggota keluarga mantan tentara ISIS.

2. Manfaat Praktis

Diharakan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintahan, baik indonesia maupun negara lainnya untuk melakukan keputusan yang tepat dalam menangani permasalahan status anggota keluarga mantan tentara ISIS.

E. Kerangka Pemikiran